

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dilansir oleh (Tribunnews.com 2010), sekitar 87,2% atau 207 juta warga Negara Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Sehingga kehidupan sehari-hari warga masyarakatnya terbilang identik dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan sekitarnya. Hampir di setiap kota maupun kabupaten dapat dijumpai pondok pesantren sebagai tempat untuk menimba ilmu keagamaan.

Keterikatan masyarakat Indonesia dengan agama yang dianutnya sudah sejak lama terjadi, bahkan sejak masih masa penjajahan. Pemahaman nilai agama dapat menjadi semangat perlawanan atas kedzaliman penjajahan (Ismail, 2017). Pemahaman agama yang dimiliki seseorang akan berdampak pada perilakunya ketika mereka menghayati nilai-nilai yang diajarkan dari Al-Quran dan Hadits. Kitab suci tersebut merupakan sumber atau pedoman tertinggi umat Islam dalam hal berperilaku, oleh karena itu, mereka selalu meyakini ilmu yang bersumber dari kitab suci ini.

Nilai-nilai agama menjadi suatu acuan kehidupan sehari-hari baik dalam pendidikan, bisnis, sosial, maupun politik. Namun, akhir-akhir ini isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) kembali menguat dikarenakan ada pihak-pihak yang menyinggung masalah keyakinan yang dimiliki oleh suatu kelompok agama, contohnya seorang tokoh politik yang menyinggung keyakinan umat muslim mengenai QS. Al-Maidah ayat 51 (Taylor, 2016).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu, Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada

orang-orang yang zalim (Taylor, 2016).

Ayat tersebut dijadikan rujukan oleh orang muslim dalam memilih seorang pemimpin. Banyak muslim menginterpretasikan secara tekstual bahwa ayat ini menegaskan tidak bolehnya menjadikan orang nonmuslim menjadi pemimpin masyarakat yang mayoritas orangnya adalah muslim. Menguatnya isu tersebut akhirnya membuat seorang Gubernur DKI kala itu mengeluarkan pernyataan dalam pidatonya “Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu” (Taylor, 2016).

Dari pernyataan tersebut sontak menimbulkan kecaman keras dari berbagai pihak yang pada saat itu juga bertepatan dengan PILKADA DKI Jakarta diantaranya pelaporan oleh MUI Sumatera Selatan, DPP FPI serta ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) (Artharini, 2016). Namun ada juga pihak yang pro terhadap hal tersebut seperti halnya pernyataan Buya Syafii “Jika diperhatikan saksama, tidak ada ucapan Ahok yang menghina. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, karena dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya. Perhatikan apa terdapat penghinaan Al-Quran? Hanya otak sakit saja yang berkesimpulan begitu” (Siregar, 2016) dan bentuk dukungan lainnya dilakukan oleh alumni Universitas Harvard dengan petisinya “Ahok Tidak Menista Agama” yang didukung oleh 77 ribu orang. (Miol, 2016).

Mereka yang tidak setuju dengan pernyataan seorang Gubernur tersebut akhirnya melakukan gerakan dengan kesamaan latar belakang orientasi yang dimiliki. Aksi 2 Desember 2016 merupakan sebuah aksi terbesar setelah Mei 1998 (Budiasa, 2017). Aksi ini terdiri dari berbagai elemen yaitu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), ormas (Organisasi Masyarakat), Pesantren, dan individu ataupun masyarakat yang berasal dari berbagai kota di Indonesia.

Aksi ini tidak hanya terjadi satu kali, tetapi gerakan ini dimulai dari tanggal 14 Oktober 2016 yang dikenal sebagai Aksi Bela Islam Jilid 1. Seusai melakukan shalat Jumat ribuan ormas Islam kemudian melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Dalam aksinya, mereka menuntut agar penyelidikan atas kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta yang bertugas saat itu cepat dilakukan, aksi damai ini berjalan dinamis dan berangsur-angsur hingga akhirnya dapat menghimpun simpatisan dari seluruh penjuru Indonesia. Umumnya mereka yang tergerak adalah orang-orang yang prihatin atas lambatnya proses hukum, serta berkeinginan untuk membela sebuah ayat dalam kitab suci yang merupakan ajaran agama yang diyakini mereka dan dengan lantang telah dinodai oleh seseorang yang memiliki nama besar di dunia politik Indonesia.

Tak kunjung mendengar respon positif dari aparat yang berwenang, tepatnya 4 November 2016 mereka melakukan aksi kembali dengan tuntutan yang masih sama. Kali ini massa sempat meminta untuk menemui Presiden Joko Widodo, namun ia sedang melakukan kunjungan kerja di luar kota. Massa hanya diterima oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada 15 November 2016 pihak yang melakukan penistaan agama resmi dijadikan tersangka, namun permasalahan tidak selesai sampai disini diakibatkan aparat masih terbilang lamban dalam menegakan keadilan.

Lazimnya jika seseorang telah dijadikan tersangka maka orang tersebut langsung diseret menuju sel tahanan dengan tanpa pandang bulu, tapi ini tidak terjadi pada tersangka penista agama ini. 2 Desember 2016 terjadi aksi kembali uniknya disini terjadi suatu fenomena *longmarch* yang dilakukan oleh pengunjuk rasa asal Ciamis. Mereka melakukan gerakan tersebut karena prihatin dengan kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. (Indrawan, 2016). Aksi Bela Islam 212 dilakukan dengan tuntutan yang juga masih sama yakni terkait dengan proses hukum. Massa menuntut pihak yang sudah berstatus tersangka untuk segera ditahan.

Berangkat menuju Monas Jakarta untuk menyuarakan aspirasi kala itu bukan hal yang mudah. Terjadi banyak polemik saat itu seperti pemberian izin jalan bagi pemilik transportasi umum lewat himbuan Kapolri, kabar miring yang beredar bahwa aksi tersebut dinilai makar, dan fatwa PBNU yang menyatakan bahwa tidak sah sholat Jumat dilapangan (Hanafi & Hidayat, 2017). Tetapi hal itu tidak menjadi hambatan bagi para pengunjung rasa untuk berangkat menuju Jakarta, seperti yang dialami oleh pengunjung rasa yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Mereka merespon keengganan PO (Perusahaan Otobus) Bus untuk mengangkut pengunjung rasa Muslim dengan cara melakukan *longmarch* “Untuk aksi ke Jakarta kita jalan kaki saja, walaupun fisik kita tidak sampai minimal pesannya sampai” (Hanafi & Hidayat, 2017). *Longmarch* dianggap sebagai media “jihad”. Menurut tuturan K.H. Nonop Hanafi yang merupakan inisiator dari gerakan ini, tujuannya tidak lain agar suara tuntutan mereka dapat tetap tersampaikan. Senin 28 Desember 2016 adalah dimulainya aksi tersebut yang diawali dengan do’a bersama oleh ribuan santri yang saat itu berkumpul di Masjid Agung Ciamis untuk memulai berangkat menuju Jakarta (Indrawan, 2016).

Aksi *longmarch* santri Ciamis terdengar sampai ke seluruh penjuru Indonesia, keteguhan untuk membela agamanya serta menuntut penerapan hukum yang terbilang sangat lamban diterapkan kepada pihak yang dilaporkan melanggar pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Gerakan santri asal Ciamis untuk berjalan kaki menuju Jakarta memunculkan efek domino sehingga ketika melewati beberapa kota seperti Tasikmalaya, Garut, dan Bandung jumlah mereka semakin bertambah. Kabar ini menjadi motivasi tersendiri bagi kota lain di Indonesia untuk ikut andil dalam Aksi Bela Islam. Dapat dikatakan bahwa banyaknya massa yang mengikuti Aksi Bela Islam 212 merupakan magnet dari aksi *longmarch* yang dilakukan oleh santri Ciamis. Tidak hanya keteguhan mereka yang terdengar sampai ke penjuru negeri tetapi pesan dan tujuan mereka pun menjadi api penyemangat kepada muslim lain untuk ikut andil dalam membela agamanya.

Dalam variabel psikologis, aksi ini meliputi *willingness to act*. Menurut Klandersman *Willingness To Act* Adalah kemauan individu untuk ambil bagian atau terlibat dalam sebuah aksi kolektif (Budiningtyas, 2009). Adapun faktor yang mempengaruhi *willingness to act* diantaranya disebutkan bahwa identitas sosial, ketidakadilan yang dirasakan, emosi dan dampak yang dirasakan memiliki hubungan positif dalam munculnya tindakan kolektif sebagaimana disebutkan oleh (Van Stekelenburg & Klandermans, 2007). Permasalahan politik yang terjadi mendorong terbentuknya suatu aksi massal yang dilakukan untuk memperoleh suatu tujuan tertentu, seperti dalam penelitian oleh Colin Wayne Leach dkk. tahun 2006 menjelaskan bahwa kemarahan berbasis kelompok menjadi prediktor yang mendasari kesediaan individu dalam aksi kolektif. Aksi kolektif mendorong masyarakat memainkan peran sosial dan politiknya, misalnya melalui partisipasi mereka dalam proses pengambilan kebijakan.

Studi terbaru juga menjelaskan peran identitas terhadap aksi kolektif seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Mirra, dkk tahun 2018. Mereka menyebutkan bahwa identitas yang terpolitisasi menjadi prediktor kuat dibandingkan identitas keagamaan yang dapat menjadikan alasan individu untuk mengikuti aksi kolektif. Dalam konteks Indonesia, orientasi politik yang relevan digunakan adalah inklusif-ekklusif. Orientasi Politik Islam Eklusif adalah satu set keyakinan yang meyakini kemurnian ajaran Islam yang bersifat sempurna, sakral dan tidak bisa berubah; menolak pengaruh budaya dan tradisi di luar ajaran Islam dalam menentukan keputusan politiknya (Fahmi, 2016).

Berdasarkan besarnya pengaruh identitas agama di Indonesia, aspek Orientasi Politik Eklusif menjadi menarik untuk diteliti mengenai hubungannya dengan *Willingness To Act* dalam aksi kolektif. Dari uraian latar belakang yang dijelaskan, peneliti tertarik untuk mengetahui Pengaruh Orientasi Politik Eklusif Terhadap *Willingness To Act* pada Aksi Bela Islam 212 *Longmarch* Ciamis-Jakarta.

Rumusan Masalah

Apakah terdapat Pengaruh Orientasi Politik Eksklusif Terhadap *Willingness To Act* pada Aksi Bela Islam 212 *Longmarch* Ciamis-Jakarta?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pengaruh Orientasi Politik Eksklusif Terhadap *Willingness To Act* pada Aksi Bela Islam 212 *Longmarch* Ciamis-Jakarta.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai Pengaruh Orientasi Politik Eksklusif Terhadap *Willingness To Act* pada Aksi Bela Islam 212 *Longmarch* Ciamis-Jakarta. Dan menjadi khasanah pengembangan ilmu Psikologi Sosial dan Politik.

Manfaat Praktis. Penelitian ini dapat menjadi perhatian agar dimasa yang akan datang, hal yang menyangkut keyakinan agama bahkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) tidak lagi disinggung atau dinodai oleh pihak mana pun.